

## **ABSTRAK**

Pekerja Migran Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global, termasuk bagi negara asal dan negara tujuan. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat berharga, pekerja migran sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Dalam tiga tahun terakhir, berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa pekerja migran dari Indonesia masih mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan mereka. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus hukum Pekerja Migran asal Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang meninggal dunia di Hongkong. Pemerintah Desa Wonoasri berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, mulai hak sebelum bekerja, sedang bekerja sampai pasca bekerja. Metode penelitian dalam riset ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil riset menyatakan bahwa harmonisasi Peraturan Desa Wonoasri No. 4 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang dialami saat bekerja dengan kasus meninggalnya Pekerja Migran Indonesia asal Desa Wonoasri di Hongkong belum sejalan dan belum bersesuaian dengan undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selain itu belum diatur dalam penanganan dan penyelesaian Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja sampai dengan pasca bekerja beserta keluarganya. Saran dari hasil riset ini segera direvisi Perdes Wonoasri tersebut dikarenakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia, Hak PMI meninggal, Pelindungan Hukum

## **ABSTRACT**

Indonesian migrant workers have a significant role in the global economy, including in their countries of origin and destination countries. However, despite their valuable contributions, migrant workers often face challenges that hinder the realization of their rights. In the last three years, various reports and studies show that migrant workers from Indonesia still experience various human rights violations, both at home and in their destination countries. This research was motivated by the legal case of a migrant worker from Wonoasri Village, Tempurejo District, Jember Regency who died in Hong Kong. The Wonoasri Village Government is obliged to protect and fulfill the rights of Indonesian Migrant Workers, starting from pre-employment, mid-employment to post-employment rights. The research method in this research uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The type of research used in this research is normative juridical research. The research results stated that the harmonization of Wonoasri Village Regulation No. 4 of 2017 in relation to fulfilling the rights of Indonesian Migrant Workers experienced while working and the case of the death of an Indonesian Migrant Worker from Wonoasri Village in Hong Kong is not in line with and is not in accordance with Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, apart from that it has not regulated the handling and settlement of Indonesian Migrant Workers who are currently working until post-employment and their families. Suggestions from the results of this research immediately revise the Wonoasri Village Regulation because it is not in accordance with the statutory regulations above.

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers, Rights of PMI to die, Legal Protection